

Korupsi Dalam Birokrasi Pemerintah: Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya

Azril Tri Zaputra¹, A. Armansyah A², Raditya Saputra³, Zainudin Hasan⁴

Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: azril.trizaputra11@gmail.com

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 08 Februari 2026

Article Accepted: 17 Mei 2026, Article published: 01 Juli 2026

ABSTRACT

Corruption in the government bureaucracy continues to be a major challenge in achieving good governance in Indonesia. Such practices not only result in financial losses for the state but also undermine public services, hinder economic development, and erode public trust in government institutions. This study aims to examine the factors contributing to corruption within the bureaucratic system and to identify effective strategies for its prevention and mitigation. The research applies a qualitative descriptive approach using a literature review method. Data were obtained from books, academic journals, laws and regulations, as well as official reports related to corruption and public administration. The findings indicate that corruption is driven by weak internal control, low integrity among public officials, a permissive organizational culture, political interference, and insufficient transparency in financial management. These conditions create opportunities for bribery, abuse of power, budget manipulation, and nepotism. Therefore, comprehensive measures are required, including bureaucratic reform, strict law enforcement, transparent governance, and active public participation. In conclusion, sustainable anti-corruption strategies are crucial for establishing a clean and accountable bureaucracy.

Keywords: corruption, bureaucracy, transparency, accountability.

ABSTRAK

Korupsi dalam birokrasi pemerintahan masih menjadi persoalan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan ekonomi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab korupsi dalam birokrasi pemerintah serta mengidentifikasi langkah-langkah yang efektif untuk pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi yang berkaitan dengan korupsi dan administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dipicu oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, budaya organisasi yang permisif, adanya intervensi politik, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya praktik suap, penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum yang tegas, penerapan tata kelola yang transparan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, strategi

antikorupsi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: korupsi, birokrasi, transparansi, akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, praktik korupsi muncul dalam beragam bentuk, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, serta kolusi dalam pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan perilaku individu, melainkan juga berhubungan erat dengan kelemahan sistem, struktur kelembagaan, dan budaya organisasi dalam pemerintahan. Dalam sejumlah kasus, praktik tersebut bahkan telah mengakar dan berkembang menjadi pola interaksi yang tidak sehat antara aparatur birokrasi, pelaku usaha, dan aktor politik.

Birokrasi sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya negara serta penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam negara modern, birokrasi dituntut untuk menjalankan fungsi pelayanan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya, birokrasi kerap menjadi ruang yang rentan terhadap korupsi karena besarnya kewenangan yang dimiliki tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Ketidakseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal berkontribusi terhadap meningkatnya potensi korupsi dalam lembaga pemerintahan (Kurniawati & Pratama, 2021). Selain itu, budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan turut memperkuat praktik korupsi dalam birokrasi (Dewi Anggraini, 2023). Penelitian lain mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan keuangan publik yang kurang transparan berpotensi mendorong terjadinya penyalahgunaan anggaran (Nurfaidah & Novita, 2020). Di samping itu, reformasi tata kelola serta penguatan pengawasan publik dinilai sebagai langkah penting dalam menekan tingkat korupsi di sektor pemerintahan (Michael Brown, 2023).

Meskipun berbagai kajian telah membahas korupsi dari perspektif hukum, ekonomi, maupun administrasi publik, masih diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara faktor struktural birokrasi, budaya organisasi, serta efektivitas upaya penanggulangan korupsi dalam satu kerangka pembahasan yang komprehensif. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab korupsi dalam birokrasi pemerintah beserta strategi penanganannya.

Korupsi dalam birokrasi memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Dari aspek ekonomi, korupsi menyebabkan inefisiensi dalam

penggunaan anggaran negara serta menghambat pembangunan nasional. Dari aspek sosial, praktik ini menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan memperlebar kesenjangan sosial. Sementara itu, dari aspek politik, korupsi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta melemahkan legitimasi lembaga negara. Hal ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dalam birokrasi pemerintahan serta mengkaji berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan kebijakan antikorupsi serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena korupsi dalam birokrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab serta upaya penanggulangannya. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur (Moleong, 2017). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder tersebut meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah maupun institusi lain yang relevan dengan kajian korupsi dan birokrasi pemerintahan. Pemanfaatan data sekunder ini dilakukan karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan teoretis terhadap berbagai sumber yang telah dipublikasikan (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian, tingkat kredibilitas sumber, serta kebaruan informasi, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis secara komprehensif. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai fenomena korupsi dalam birokrasi (Creswell, 2014). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, diuraikan, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai bentuk-bentuk korupsi dalam birokrasi, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta strategi penanggulangannya. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan berbagai temuan dari literatur sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan logis terhadap fenomena yang diteliti (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam birokrasi pemerintahan merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan kajian berbagai literatur, diketahui bahwa praktik korupsi dalam birokrasi tidak hanya muncul dalam satu bentuk, tetapi berkembang dalam beragam variasi, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, serta nepotisme dalam proses pengambilan keputusan publik. Berbagai bentuk tersebut cenderung berlangsung secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu aktor, baik dari internal birokrasi maupun pihak eksternal (Mardiasmo, 2018; Kurniawati & Pratama, 2021).

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi dalam birokrasi. Pengawasan yang tidak berjalan secara efektif menyebabkan berbagai bentuk penyimpangan tidak terdeteksi sejak dini. Selain itu, rendahnya integritas aparatur pemerintah turut meningkatkan peluang terjadinya praktik korupsi, di mana kewenangan yang dimiliki sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Nugroho, 2019).

Temuan lain menunjukkan bahwa budaya organisasi yang cenderung permisif terhadap penyimpangan turut berperan dalam mempertahankan praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Dalam kondisi tertentu, praktik seperti pemberian “uang pelicin” dianggap sebagai hal yang lumrah untuk mempercepat proses pelayanan publik. Kondisi ini semakin diperkuat oleh adanya intervensi politik serta kepentingan kelompok tertentu yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam birokrasi (Michael Brown, 2023).

Dari perspektif sistem, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara serta kompleksitas prosedur administrasi juga membuka peluang terjadinya korupsi. Sistem yang belum sepenuhnya terdigitalisasi dan bersifat terbuka menciptakan ruang interaksi langsung yang rentan dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan (Siti Nurhaliza, 2023).

Table : 1 Ringkasan Faktor Penyebab Korupsi dalam Birokrasi Pemerintah

No	Faktor Penyebab	Penjelasan
1	Lemahnya pengawasan	Sistem pengawasan internal belum efektif
2	Rendahnya integritas	Aparatur cenderung menyalahgunakan wewenang
3	Budaya organisasi	Adanya toleransi terhadap praktik korupsi
4	Intervensi politik	Adanya tekanan dari pihak eksternal
5	Kurangnya transparansi	Sistem keuangan belum terbuka secara optimal

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak korupsi dalam birokrasi bersifat luas dan multidimensional. Dari aspek ekonomi, korupsi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Dari aspek sosial, praktik tersebut menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Sementara itu, dari aspek politik, korupsi berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga melemahkan kualitas pembangunan nasional, karena anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan (Michael Brown, 2023; Mardiasmo, 2018).

Upaya penanggulangan korupsi dalam birokrasi, berdasarkan hasil kajian, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penegakan hukum yang tegas merupakan langkah utama yang perlu dilakukan. Di samping itu, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan guna mendorong terciptanya sistem yang lebih akuntabel (Zainudin Hasan, 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penanganan korupsi dalam birokrasi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan upaya yang mencakup perbaikan sistem, pembenahan budaya organisasi, serta penguatan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sugiyono, 2019).

SIMPULAN

Hasil analisis lanjutan menunjukkan bahwa dampak korupsi dalam birokrasi bersifat luas dan multidimensional. Dari sisi ekonomi, korupsi mengakibatkan inefisiensi dalam pemanfaatan anggaran negara. Dari sisi sosial, praktik tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, dari sisi politik, korupsi berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga berimplikasi pada melemahnya kualitas pembangunan nasional, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan (Michael Brown, 2023; Mardiasmo, 2018). Berdasarkan hasil kajian, upaya penanggulangan korupsi dalam birokrasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penegakan hukum yang tegas merupakan langkah utama yang perlu diimplementasikan. Di samping itu, partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan guna mendorong terciptanya sistem yang lebih akuntabel (Zainudin Hasan, 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penanganan korupsi dalam birokrasi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata. Diperlukan upaya yang mencakup pembenahan sistem, perbaikan budaya organisasi, serta penguatan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sugiyono, 2019).

DAFTAR RUJUKAN

- Brown, M. (2023). Public sector corruption and governance reform. *International Journal of Public Administration*, 46(5), 682.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(1), 18.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. (2019). Wajar tanpa pengecualian dan tantangan pencegahan korupsi di daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(2), 55.
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2020). Analisis tingkat korupsi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(1), 52.
- Siti Nurhaliza. (2023). Strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan sistemik. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 205.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zainudin Hasan. (2025). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Zainudin Hasan, Tami Rusli, & Nuris Sanida. (2025). *Eksplorasi model pembelajaran anti korupsi yang berkearifan lokal*. Bandar Lampung: UBL Press.